

ABSTRAK

Majelis Pendidikan Daerah (MPD) Kabupaten Bener Meriah merupakan lembaga otonom dan mandiri yang memiliki peran strategis dalam penyelenggaraan pendidikan di daerah, sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan. Penelitian ini bertujuan mendeskripsikan pelaksanaan tugas dan wewenang MPD Kabupaten Bener Meriah periode 2023-2025 serta mengidentifikasi faktor pendukung dan penghambatnya. Pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif digunakan, dengan pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Informan penelitian terdiri dari Wakil Ketua MPD, Kepala Bidang Pembinaan Pendidikan Dasar Dinas Pendidikan, Kepala Sekolah MIN 2 Bener Meriah, dan perwakilan masyarakat. Analisis data menggunakan model Miles dan Huberman, serta keabsahan data diuji melalui triangulasi sumber, teknik, dan waktu. Teori yang digunakan adalah Teori Kinerja Organisasi Publik dari Ongena, van de Wetering, dan Batenburg (2026). Hasil penelitian menunjukkan pelaksanaan tugas dan wewenang MPD telah berjalan sesuai peran dan fungsi yang diamanatkan, mencakup fungsi pertimbangan, mediasi, penghubung masyarakat dengan pemerintah daerah, serta pengembangan dan pengawasan pendidikan. Hal ini tercermin dari program Sekolah dan Madrasah Belangi, pengembangan muatan lokal Bahasa Gayo, pengiriman guru berprestasi ke tingkat nasional, inisiasi qanun muatan lokal, serta penanganan sekolah terdampak bencana. Faktor pendukung meliputi dukungan pemerintah daerah, koordinasi baik dengan Dinas Pendidikan, serta dukungan sekolah dan masyarakat. Faktor penghambatnya adalah keterbatasan anggaran akibat kebijakan refocusing, belum optimalnya peran komite sekolah, dan berkurangnya intensitas kunjungan lapangan. Penelitian merekomendasikan penguatan advokasi anggaran, optimalisasi pemanfaatan teknologi digital, peningkatan kapasitas pemangku kepentingan, dan revitalisasi struktur organisasi MPD.

Kata Kunci: Tugas, Wewenang, MPD, Penyelenggaraan, Pendidikan

ABSTRACT

The Regional Education Council (MPD) of Bener Meriah Regency is an autonomous and independent institution that holds a strategic role in the implementation of education at the regional level, as mandated by Law Number 20 of 2003 concerning the National Education System and Government Regulation Number 17 of 2010 concerning Education Management and Implementation. This study aims to describe the implementation of duties and authorities of the MPD of Bener Meriah Regency for the 2023-2025 period and to identify the supporting and inhibiting factors. A qualitative approach with descriptive methods was employed, utilizing interviews, observation, and documentation for data collection. The informants comprised the Vice Chairman of MPD, the Head of Basic Education Development at the Education Office, the Principal of MIN 2 Bener Meriah, and a community representative. Data analysis followed the Miles and Huberman interactive model, with data validity ensured through source, technique, and time triangulation. The study applies the Public Organization Performance Theory by Ongena, van de Wetering, and Batenburg (2026). The findings indicate that the implementation of MPD duties and authorities has generally proceeded in accordance with the mandated roles and functions, encompassing advisory, mediation, community-government liaison, as well as educational development and oversight functions. This is reflected in various programs such as the Belangi Schools and Madrasahs Program, the development of Gayo language local content, the sending of outstanding teachers to the national level, the initiation of a local regulation on local content, and the handling of disaster-affected schools. Supporting factors include government support, good coordination with the Education Office, and support from schools and the community. Inhibiting factors include budget constraints due to refocusing policies, the suboptimal role of school committees, and reduced intensity of field visits. The study recommends strengthening budget advocacy, optimizing the use of digital technology, enhancing stakeholder capacity, and revitalizing the MPD organizational structure.

Keywords: *Duties, Authority, MPD, Implementation, Education*